

## Spektrum konseptual pendidikan kewarganegaraan di era globalisasi untuk membangun kerangka aksiologis pendidikan kewarganegaraan Indonesia

Fitri Silvia Sofyan <sup>a,1\*</sup>, Aris Riswandi Sanusi <sup>b,2</sup>

<sup>a, b</sup> Universitas Buana Perjuangan, Karawang

<sup>1</sup> fitrisofyan@ubpkarawang.ac.id; arissanusi@ubpkarawang.ac.id;

### ABSTRAK

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep-konsep kewarganegaraan di era globalisasi dalam membangun kerangka aksiologi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. Melalui metode studi literatur ini dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan konsep baru kewarganegaraan di era globalisasi yang selanjutnya direkonstruksikan dalam pembangunan kerangka aksiologis Pendidikan Kewarganegaraan. Berdasarkan hasil analisis literatur ditemukan fokus kajian sekaligus masalah-masalah kewarganegaraan saat ini meliputi warga negara global, nilai dan moral global, lingkungan hidup, dan teknologi keterbaharuan kemudian dikategorikan sebagai konsep-konsep kewarganegaraan di era globalisasi yang lebih lanjut menjadikannya sebagai bahan kajian dalam membangun kerangka aksiologis Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia.

**Kata kunci:** *pendidikan kewarganegaraan, globalisasi, aksiologi*

### ABSTRACT

*The writing of this article aims to analyze the concepts of citizenship in the era of globalization in building the axiological framework of Citizenship Education in Indonesia. Through this literature study method, it is used as a reference to develop new concepts of citizenship in the era of globalization, which are subsequently reconstructed in the development of the axiological framework of Civic Education. Based on the results of the literature analysis it is found that the focus of the study as well as the problems of citizenship currently include global citizens, global values and morals, the environment, and renewable technology and then categorized as citizenship concepts in the era of globalization which further makes it a study material in building a framework axiological Civic Education in Indonesia.*

**Keywords:** *civic education, globalization, axiologists*

Copyright ©2020 Universitas Ahmad Dahlan, All Right Reserved

### PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang menjadi salah satu tujuan dari dampak yang dihasilkan oleh globalisasi. Globalisasi dewasa ini menjadi sebuah tuntutan yang harus dihadapi seluruh warga negara dunia. Pesatnya arus informasi dan komunikasi berdampak pada pergeseran peran warga negara yang menuntut untuk semakin dewasa dalam menyikapinya. Pergeseran peran warga negara disebabkan oleh tekanan yang diberikan globalisasi dalam seluruh aspek kehidupan kebangsaan, seperti ekonomi, sosial budaya, hukum, dan politik. Kekuatan utama globalisasi, yang meliputi saling ketergantungan ekonomi, semakin pentingnya organisasi politik dan ekonomi internasional, dan peningkatan migrasi yang cepat adalah kenyataan yang telah menyebabkan komunitas akademik di bidang kajian kewarganegaraan menyerukan interpretasi kewarganegaraan yang lebih global (Banks, 2004; Barbules & Torres, 2000; Castle,

2004; Heater, 2000; Morais & Ogden, 2011; Oxfam, 2006; Rapoport, 2010)

Kajian Kewarganegaraan di era globalisasi saat ini semakin dituntut untuk mampu memecahkan masalah kewarganegaraan yang semakin kompleks menasar pada energi, teknologi, dan lingkungan. Menguaknya kembali masalah-masalah stereotip atas dasar pluralism etnis, gender, dan budaya semakin menuntut perkembangan kewarganegaraan dalam menyikapi isu-isu global. Hal ini menuntut para akademisi di bidang kewarganegaraan untuk memberikan fokusnya pada penentuan arah perkembangan aksiologi Pendidikan Kewarganegaraan sehingga mampu menjawab permasalahan globalisasi. Jika cara pandang kita terhadap globalisasi sebagai sebuah tantangan sudah seharusnya menjadi sebuah masalah yang harus dihadapi bangsa Indonesia. Dalam hal ini, para akademisi dalam kajian kewarganegaraan dituntut untuk berpikir dan mencari solusi melalui pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan

sehingga Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia mampu menjawab semua tantangan globalisasi tersebut. Pendidikan Kewarganegaraan dalam dimensi akademik, sebagaimana dijelaskan oleh Sapriya (2012) berkaitan erat dengan tujuan untuk memecahkan masalah-masalah konseptual dan operasional guna menghasilkan generalisasi dan teori untuk membangun batang tubuh keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan. Kajian ilmiah kewarganegaraan juga mencakup *civic research dan development* (CRD). *Civic education research and development* merupakan bidang keilmuan yang dengan sendirinya tunduk pada kaidah-kaidah keilmuan yang bersifat universal dan kontekstual dalam disiplinnya (Winataputra, 2008). Kinerja akademiknya serta hak dan tanggungjawabnya sebagai ilmuwan atau praktisi dengan sendirinya tunduk pada nilai dan norma akademik dalam bidangnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Winataputra (2001):

Program PKn dalam dimensi akademik meliputi program kajian ilmiah yang dilakukan oleh komunitas akademik PKn menggunakan pendekatan dan metode penelitian ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah konseptual dan operasional guna menghasilkan generalisasi dan teori berlandaskan pada landasan filosofis negara, sosial kultural, landasan konstitusional, dan landasan ilmiah sebagai perekat dan simpul untuk menjaga objektivitas dan universalitas keilmuan.

Tantangan globalisasi bagi bangsa Indonesia dapat dijawab melalui pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan. Tiada lain pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan ini bertujuan untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Hanya bangsa cerdas yang mampu menjalankan roda kehidupan negara dengan mengedepankan nilai-nilai luhur kebangsaan dalam pesatnya benturan budaya di era globalisasi ini. Berkaitan dengan makna “mencerdaskan kehidupan bangsa”, Wahab dan Sapriya (2011) mengemukakan:

Apabila dikaji maka tiga kata tersebut mengandung makna yang cukup dalam. Mencerdaskan kehidupan bangsa mengandung pesan pentingnya pendidikan bagi seluruh anak bangsa. Dalam kehidupan berkewarganegaraan, pernyataan ini memberikan pesan kepada penyelenggara negara dan segenap rakyat agar memiliki kemampuan dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku secara cerdas baik dalam proses pemecahan masalah maupun dalam pengambilan keputusan kenegaraan kebangsaan, dan kemasyarakatan.

Berangkat dari pandangan ini, Pendidikan Kewarganegaraan menjadi solusi atas masalah-masalah kontemporer sebagai dampak yang tak

terpisahkan dari pesatnya arus teknologi dan informasi di era globalisasi. Permasalahan yang muncul memberikan warna baru yang menuntut diperlukannya pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan sehingga mampu memberikan jalan dalam menentukan landasan dan kerangka ontologis, epistemologis, maupun aksiologis Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia.

## METODE

Metode penulisan artikel dilakukan dengan menggunakan studi literatur melalui proses pencarian referensi yang relevan dengan permasalahan yang telah ditentukan. Referensi teoritis yang diperoleh melalui studi literatur ini dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan konsep baru sebagai bahan penelitian lanjutan. Prosedur yang ditempuh yaitu melalui analisis literatur tentang konsep kewarganegaraan di era globalisasi yang selanjutnya direkonstruksikan dalam pembangunan kerangka aksiologis Pendidikan Kewarganegaraan. Adapun analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penulisan artikel ini setidaknya terdapat empat konsep kewarganegaraan yang dapat dijadikan bahan kajian dalam membangun kerangka aksiologis Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. Adapun konsep-konsep tersebut meliputi warga negara global (*global citizenry*), nilai dan moral global, teknologi keterbaharuan, dan lingkungan. Setidaknya empat konsep kontemporer ini menjadi masalah yang dihadapi warga negara dalam menjalani kehidupannya di era globalisasi.

### Warga negara global

Pada dasarnya globalisasi memberikan peluang besar bagi warga negara untuk berhubungan dengan warga negara lainnya tanpa menghiraukan batas-batas teritorial dan batas budaya. Hal ini memungkinkan besarnya peluang untuk terjadinya konflik. Tidak menutup kemungkinan benturan bahkan terjadinya konflik budaya akan semakin besar terjadi mengingat keragaman budaya menuntut warga negara untuk saling memahami dalam perbedaan yang bahkan cenderung saling bertentangan. Munculnya konsepsi warga negara global (*global citizenry*) menuntut seluruh warga negara di dunia untuk belajar memahami perbedaan budaya dalam dunia yang semakin terbuka sehingga mampu berdampingan secara damai dan harmonis.

Dalam hal ini, Pendidikan Kewarganegaraan menempati peran yang sangat vital dalam mengantisipasi kemungkinan konflik yang terjadi karena dalih benturan budaya. Dalam pandangan Kartadinata dkk. (2015) bahwa perdamaian dan kekerasan lahir dari pemikiran manusia. Selanjutnya diperkuat melalui makna pendidikan dalam sistem pendidikan nasional bertujuan untuk menciptakan manusia Indonesia yang memiliki sikap religius dan cerdas dalam berpikir dan bertindak. Hal ini membuktikan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membentuk manusia agar mampu memberikan pikiran dan sikap positif dalam menghadapi situasi yang bertentangan dengan latar belakangnya baik budaya maupun agama. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan sudah seharusnya tidak hanya menitikberatkan pada sisi kognisi warga negara seperti yang cenderung terjadi pada pendidikan kita namun justru harus mampu menyentuh sisi afeksi dan psikomotor warga negara secara proporsional. Jika Pendidikan Kewarganegaraan sudah mampu dijalankan secara profesional diyakini bahwa perkembangan konsep-konsep PKn akan semakin kaya sehingga mampu tercipta PKn yang mampu menjawab permasalahan yang ditimbulkan oleh globalisasi.

Konsepsi warga negara global pada dasarnya bukan merupakan hal yang baru dalam kajian kewarganegaraan, namun semakin pesatnya dampak globalisasi pada teknologi informasi terlebih masuknya era baru yang dikenal dengan revolusi industri keempat menjadi tantangan yang sudah seharusnya menjadi fokus perhatian para akademisi PKn. Schwab (2019) mengatakan teknologi dan digitalisasi akan merevolusi segalanya. Kecepatan inovasi, dalam arti pengembangan dan penyebarannya, jauh lebih besar dan cepat dari sebelumnya. Hal ini diartikan bahwa peluang untuk menjadi bagian warga negara global sangat terbuka lebar, walaupun melalui dunia maya seperti media sosial. Namun di sisi lain terdapat celah yaitu semakin besar peluang terkikisnya karakter kebangsaan pada warga negara Indonesia. Maka, sudah menjadi kewajiban bagi seluruh akademisi PKn untuk memprioritaskan pada penguatan karakter kebangsaan bagi warga negara Indonesia. Dalam hal ini, PKn harus mampu menyesuaikan diri dan berkembang demi membangun keilmuan PKn di era revolusi industri keempat. Sebagaimana dijelaskan oleh Sapriya (2012, hal. 17-18) berkaitan erat dengan tujuan untuk memecahkan masalah-masalah konseptual dan operasional guna menghasilkan generalisasi dan teori untuk membangun batang tubuh keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan karakter bagi mahasiswa menjadi suatu keharusan agar mampu menjalankan peran sebagai agen perubahan untuk membawa masyarakat ke arah perubahan yang lebih baik sesuai dengan nilai luhur dalam pergaulannya secara global. Untuk itu, mahasiswa sebagai agen perubahan seharusnya harus memiliki karakter sebagai dasar untuk merubah masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga memiliki kewajiban lainnya sebagai agen kontrol sosial agar mampu mengontrol perubahan masyarakat tetap berjalan sesuai koridor nilai bangsa. Terakhir mahasiswa menjadi penjaga dan wajib melestarikan nilai yang hidup di masyarakat. Maka sudah menjadi kewajiban bagi pendidikan tinggi untuk terus menyelenggarakan pendidikan karakter bagi mahasiswa sehingga mampu dipersiapkan dapat membawa masyarakat ke arah yang lebih baik seperti diungkap Wabah yaitu mampu "*think globally, act locally*". Beranjak dari konsepsi pertama ini, dapat dijadikan bahan membangun kerangka aksiologis PKn dimana PKn harus mampu mempersiapkan dan menciptakan warga negara Indonesia yang mampu berpartisipasi dalam pergaulan global dengan mendasari perilakunya pada nilai-nilai luhur kebangsaan.

#### **Nilai dan moral global**

Selanjutnya, konsepsi yang tidak bisa dilepaskan dari konsep warga negara global yaitu terkait nilai dan moral global. Dewasa ini terorisme dan fundamentalisme agama yang cenderung ke arah radikalisme menjadi masalah global yang harus dihadapi seluruh warga negara dunia. Terorisme menjadi semakin mendunia merupakan dampak semakin pesatnya arus internet di era revolusi industri keempat yang membuka peluang semakin besarnya para pelaku di seluruh pelosok negara. Selain itu pula membuka peluang munculnya *cyber terrorism* yang menuntut setiap negara untuk terus bersatu melawan dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Salah satu sisi negative dari pesatnya teknologi internet memudahkan manusia untuk memobilisasi dan menambah kekuatan untuk melawan pemerintah dan meneror manusia lainnya.

Hakikat PKn lebih merupakan bentuk pengajaran politik atau pendidikan politik. Sebagai pendidikan politik berarti fokusnya lebih menekankan bagaimana membina warga negara yang lebih baik (memiliki kesadaran politik dan hukum) lewat suatu proses belajar-mengajar. Melalui PKn diharapkan terbentuknya warga negara yang baik yang mampu berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Somantri (1976) mengungkapkan bahwa PKn merupakan program pendidikan yang berintikan demokrasi politik,

yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, *positive influence* pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua, yang kesemuanya itu diproses untuk melatih pelajar-pelajar berpikir kritis, analitis, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

PKn merupakan wahana pendidikan dalam membentuk warga negara yang demokratis saat ini difokuskan sebagai upaya melawan segala bentuk perilaku menyimpang seperti kasus terorisme dan paham fundamentalis. Dalam menjawab masalah-masalah tersebut, sudah selayaknya fokus kajian dunia saat ini adalah bagaimana menyadarkan umat manusia agar menjunjung tinggi nilai dan moral global yang tercerminkan dalam hak asasi manusia. Konsepsi nilai dan moral global ini diartikan sebagai penguatan pemahaman manusia agar mampu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Indonesia yang dipandang dunia sebagai negara yang berbudaya, demokratis, dan beradab seakan berubah menjadi negara yang sering terjadi terror. Tantangan PKn saat ini adalah bagaimana kembali menyadarkan bangsa tentang pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam kehidupan yang demokratis. Robinson (1967) berpendapat bahwa PKn dewasa ini meminta untuk membuat warga negara yang terinformasi, analitis, melaksanakan nilai-nilai demokrasi, dan terlibat aktif dalam masyarakat. Berangkat dari konsepsi ini, usaha membangun kerangka aksiologis PKn ditujukan untuk membentuk warga negara yang sadar akan penghormatan hak asasi manusia demi terciptanya pedoman nilai dan moral global.

### **Lingkungan hidup**

Menurut UU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, 1997). Pada umumnya, istilah lingkungan hidup sering kita gunakan untuk membicarakan segala hal yang berkaitan dengan kelangsungan hidup seluruh makhluk yang hidup mendiami muka bumi. Kelestarian lingkungan memiliki peranan yang sangat besar dalam menopang kelangsungan hidup dan kehidupan di bumi. Hal ini dikarenakan kelangsungan hidup di muka bumi akan tetap berlangsung jika lingkungan tetap terjaga keseimbangannya. Kerusakan dan kehancuran lingkungan akan berdampak pada ancaman terhadap kehidupan manusia itu sendiri.

Manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki peran yang besar dalam menentukan keseimbangan lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi mampu merubah wajah dunia dari pola kehidupan sederhana sampai ke bentuk kehidupan modern seperti sekarang ini. Namun seiring perkembangan kehidupan manusia yang modern, permasalahan lingkungan menjadi salah satu masalah pelik yang sering kali disebabkan oleh perilaku manusia yang keluar dari batas perannya sebagai sosok yang harus menjaga kehidupan. Keraf (2010) krisis lingkungan yang dialami umat manusia berakar pada kesalahan perilaku, dimana kesalahan tersebut timbul karena kekeliruan perspektif manusia tentang manusia sendiri, alam, dan hubungan antara manusia dengan seluruh alam semesta. Pemikiran manusia saat ini lebih mengedepankan sikap rakus tanpa memikirkan kepentingan hidup generasi selanjutnya. Banyak kemajuan yang diraih oleh manusia membawa dampak buruk terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Krisis lingkungan yang dialami umat manusia merupakan salah satu dampak dari kehidupan manusia yang cenderung chaotic dikarenakan: 1) tetap meningkatnya pertumbuhan populasi dunia yang melebihi kapasitas produktivitas natural bumi, 2) perkembangan komunikasi dan transportasi yang cepat sehingga menghasilkan "*world interlinkages*" seperti globalisasi ekonomi, perdagangan, krisis lingkungan, masalah pembangunan, kemiskinan dan lain-lain (Sudibyo, 2008). Menjaga dan melestarikan lingkungan menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh warga negara demi terjaminnya kehidupan generasi mendatang. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk bahu membahu berusaha menyelamatkan keseimbangan lingkungan. Sekecil apa pun usaha yang kita lakukan sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya kelangsungan hidup generasi kelak.

Sebagai warga negara yang baik, warga negara dituntut memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya dan mampu menanggulangi krisis tersebut. Dalam hal ini, akademisi dalam bidang kajian PKn dituntut untuk mampu menyelenggarakan program pendidikan yang mampu mengarahkan warga negara yang memiliki kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup demi generasi selanjutnya. Parker dkk (Winataputra & Budimansyah, 2007) mengemukakan bahwa pendidikan kewarganegaraan perlu diwujudkan dalam bentuk seperangkat kurikulum yang diarahkan pada pengembangan warga dunia yang mampu mengelola krisis. PKn memiliki peran penting dalam membentuk warga negara yang sadar akan

lingkungan. Perkembangan teknologi sudah seharusnya diimbangi dengan penguatan terhadap upaya pemeliharaan lingkungan hidup.

Permasalahan dan krisis lingkungan sudah seharusnya menjadi fokus kajian PKn selanjutnya sebagai bahan kajian dalam membangun kerangka aksiologi PKn demi terbentuknya kesadaran warga negara terhadap pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan. Dalam hal ini, PKn memiliki tujuan sebagai program pendidikan yang berupaya membentuk kesalehan dan kesadaran warga negara terhadap lingkungan hidup demi terjaganya keseimbangan lingkungan dalam menunjang kehidupan generasi warga negara ke depannya.

### **Teknologi keterbaharuan**

Pesatnya arus globalisasi dan masuknya era revolusi industri keempat ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi yang diharapkan menunjang kehidupan manusia. Revolusi industri keempat memiliki cakupan yang sangat besar bukan hanya mengenai mesin pintar yang terhubung. Gelombang terobosan lebih lanjut telah muncul secara serentak di berbagai bidang, mulai dari pengurutan DNA sampai nanoteknologi. Mulai dari energy terbarukan sampai komputasi kuantum (Schwab, 2019). Dalam revolusi industri keempat ini, banyak teknologi-teknologi baru dan inovasi akan mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan pesat serta menyebar ke seluruh belahan dunia. Pada saat yang bersamaan, revolusi industri keempat akan berdampak pada kemajuan yang positif disertai dengan tantangan yang besar pula. Keuntungan yang diperoleh dari pesatnya keterbaharuan teknologi memberikan kemudahan yang sangat besar dalam menunjang kehidupan manusia. Anggaphlah dengan adanya internet, handphone, dan menjamurnya aplikasi membuat hidup kita lebih mudah dan secara keseluruhan lebih produktif mengarah pada digitalisasi dan teknologi informasi.

Penghubung penting antara penerapan fisik dan digital yang dimungkinkan dengan terjadinya revolusi industri keempat adalah internet of things. Dalam bentuknya yang paling sederhana, teknologi ini dapat dijelaskan sebagai relasi antara hal-hal (produk, layanan, tempat) dan manusia yang dimungkinkan oleh teknologi dan beragam platform yang saling berhubungan. Sensor dan banyak cara lain yang digunakan untuk menghubungkan hal-hal di dunia fisik dengan jaringan virtual sedang berkembang dengan kecepatan yang mengagumkan (Schwab, 2019).

Saat ini pula, revolusi industri keempat sedang mengarah pada inovasi baru mengarah

pada aspek biologis manusia. Bisa dicontohkan dalam hal bayi tabung, pencangkokan DNA, perkawinan silang, dan lain sebagainya yang justru di sisi lainnya berbenturan dengan kodrat manusia dan kehidupan. Schwab (2019) mengatakan pada gugus biologis inilah tantangan terbesar bagi pengembangan norma sosial sekaligus aturan yang sesuai. Kita dihadapkan pada pertanyaan baru seputar apa artinya menjadi manusia.

Tantangan-tantangan yang dihadapi dari pesatnya arus keterbaharuan teknologi tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan warga negara. Pesatnya teknologi yang menunjang kehidupan manusia tanpa disadari pula berdampak pada perubahan perilaku warga negara ke arah penurunan moral yang jauh dari budaya. Bahkan lebih lagi terkait masalah yang berhadapan perilaku yang melampaui batas kodrat kemanusiaan. Hal ini menjadi tantangan dalam kajian PKn terlebih dampak besar yang dirasakan warga negara Indonesia justru lebih condong mengarah pada pemerosotan moral kebangsaan. Yang seharusnya dilakukan dalam menyikapi masalah ini adalah pembentukan warga negara digital. Mossberger dkk (Mossberger et al., 2008) menyebut bahwa warga negara digital didefinisikan (*digital citizen*) *are those who use technology frequently, who use technology for political information to fulfill their civic duty, and who use technology at work for economic gain*. Konsep warga negara digital yang cerdas dan baik menjadi konsep yang ideal bagi warga negara hidup di era digital. Warga negara digital yang cerdas dan baik dapat dilihat dari perilaku cerdas dan baik ketika beraktifitas di masyarakat dalam jaringan (*Online Community*). Agar warga negara dapat berkontribusi positif dalam kehidupan digital warga negara seharusnya memiliki perilaku yang cerdas dan baik. Oleh karena itu, kemajuan teknologi menjadi dasar membangun kerangka aksiologis PKn di Indonesia dengan tujuan membentuk warga negara digital yang memiliki perilaku yang cerdas dan baik dalam memaksimalkan kemajuan teknologi.

### **KESIMPULAN**

Globalisasi dan revolusi industri keempat merupakan suatu keniscayaan dalam perkembangan konsep-konsep kewarganegaraan saat ini. Lahirnya konsep-konsep kewarganegaraan di era globalisasi seperti konsep warga negara global, nilai dan moral global, lingkungan hidup, dan teknologi keterbaharuan menjadi bahan kajian bagi akademisi bidang Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun kerangka aksiologis Pendidikan Kewarganegaraan

di Indonesia. Hal ini menjadi sebuah tantangan bagi akademisi Pendidikan Kewarganegaraan agar terus fokus terhadap isu-isu kontemporer sehingga dapat tercapainya tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang sesuai dengan tujuan kehidupan kebangsaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Banks, J. A. (2004). Introduction: Democratic citizenship education in multicultural societies. In J. A. Banks (Ed.), *Diversity and citizenship education: Global perspectives* (hal. 17–48). Jossey-Bass.
- Barbules, N. C., & Torres, C. A. (2000). Globalization and education: An introduction. In N. C. Barbules & C. A. Torres (Ed.), *Globalization and Education: Critical Perspectives* (hal. 1–27). Routledge.
- Castle, S. (2004). Migration, citizenship, and education. In J. A. Banks (Ed.), *Diversity and citizenship education: Global perspectives*. Jossey-Bass.
- Heater, D. (2000). Does cosmopolitan thinking have a future? *Review of International Studies*, 26(5), 79–197.  
<https://doi.org/10.1017/S0260210500001790>
- Kartadinata, S., Affandi, I., Wahyudin, D., & Ruyadi, Y. (2015). *Pendidikan kedamaian*. Remaja Rosdakarya.
- Keraf, A. S. (2010). *Etika lingkungan hidup*. Penerbit Buku Kompas.
- Morais, D. B., & Ogden, A. C. (2011). Initial development and validation of the global citizenship scale. *Journal of Studies in International Education*, 15(5), 445–466.  
<https://doi.org/10.1177/1028315310375308>
- Mossberger, K., Tolbert, C. J., & Mcneal, R. S. (2008). *Digital citizenship. The internet, society, and participation*. The MIT Press.  
<http://mitpress.mit.edu>
- Oxfam. (2006). *Education for global citizenship: A guide for schools*. Oxfam GB.
- Rapoport, A. (2010). We cannot teach what we don't know: Indiana teachers talk about global citizenship education. *Education, Citizenship and Social Justice*, 5(3), 179–190.  
<https://doi.org/10.1177/1746197910382256>
- Robinson, D. (1967). *Promoting Practices In Civic Education*. NCSS.
- Sapriya. (2012). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama.
- Schwab, K. (2019). *Revolusi Industri Keempat*. Gramedia Pustaka Utama.
- Somantri, M. N. (1976). *Metode Mengajar Civics*. Erlangga.
- Sudibyo, R. (2008). *Konsep EfSD di Indonesia*. Universitas Gadjah Mada.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, (1997).
- Wahab, A. A., & Sapriya. (2011). *Teori dan landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Alfabeta.
- Winataputra, U. S. (2008). Multikulturalisme-Bhinneka Tunggal Ika Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol 14, No 75 (2008), 1009–1027.  
<http://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/view/364>
- Winataputra, U. S., & Budimansyah, D. (2007). *Civic education: Konteks, landasan, bahan ajar, dan kultur kelas*. Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.